

MODERASI BERAGAMA SEBAGAI INSTRUMEN HEGEMONI NEGARA: ANALISIS PERSPEKTIF ANTONIO GRAMSCI

Tezar Pirliansa

UIN Sultan Thaha Saifuddin Jambi

tezar154@gmail.com

Abstrak

Moderasi beragama dalam beberapa tahun terakhir berkembang menjadi salah satu agenda strategis negara dalam menjaga stabilitas sosial dan kehidupan keberagamaan masyarakat Indonesia. Wacana tersebut diproduksi secara massif melalui lembaga pendidikan, media, birokrasi keagamaan, serta berbagai kebijakan pemerintah sebagai upaya menghadapi meningkatnya intoleransi, radikalisme, dan polarisasi sosial berbasis agama. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis moderasi beragama dalam perspektif teori hegemoni Antonio Gramsci dengan melihat bagaimana negara membangun konsensus sosial melalui produksi wacana keagamaan di ruang publik. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan library research melalui analisis berbagai literatur, jurnal ilmiah, buku, dan dokumen resmi pemerintah yang berkaitan dengan moderasi beragama dan teori hegemoni. Hasil penelitian menunjukkan bahwa moderasi beragama tidak hanya berfungsi sebagai proyek sosial-keagamaan dalam menjaga toleransi dan harmoni masyarakat, tetapi juga menjadi instrumen hegemonik negara dalam membentuk pola keberagamaan masyarakat Indonesia. Dalam perspektif Gramsci, dominasi negara berlangsung melalui mekanisme persetujuan sosial (consent) dengan memanfaatkan institusi pendidikan, media, dan otoritas keagamaan untuk membangun legitimasi terhadap model keberagamaan tertentu yang dianggap sesuai dengan kepentingan nasional. Penelitian ini menegaskan bahwa relasi agama dan negara di Indonesia tidak dapat dipisahkan dari praktik produksi wacana dan kepentingan kekuasaan yang bekerja di dalamnya.

Kata Kunci: Antonio Gramsci, Hegemoni, Moderasi Beragama, Negara

Abstract

In recent years, religious moderation has emerged as a strategic state agenda for maintaining social stability and the religious life of Indonesian society. This discourse is produced extensively through educational institutions, the media, religious bureaucracies, and various government policies as an effort to address rising intolerance, radicalism, and religion-based social polarization. This study aims to analyze religious moderation through the lens of Antonio Gramsci's theory of hegemony, examining how the state builds social consensus through the production of religious discourse in the public sphere. Employing a qualitative method with a library research approach, this study analyzes various literature, academic journals, books, and official government documents related to religious moderation and hegemony theory. The findings indicate that religious moderation functions not only as a socio-religious

project to maintain tolerance and social harmony but also as a hegemonic instrument of the state in shaping the religious patterns of Indonesian society. From a Gramscian perspective, state domination operates through the mechanism of social consent, utilizing educational institutions, the media, and religious authorities to build legitimacy for a specific model of religiosity deemed aligned with national interests. This study asserts that the religion-state relationship in Indonesia cannot be disentangled from the practices of discourse production and the underlying power interests at play.

Keywords: Antonio Gramsci, Hegemony, Religious Moderation, State

Pendahuluan

Wacana moderasi beragama dalam beberapa tahun terakhir berkembang menjadi salah satu agenda strategis negara dalam menjaga stabilitas sosial dan kehidupan keberagamaan masyarakat Indonesia. Pemerintah melalui Kementerian Agama Republik Indonesia menjadikan moderasi beragama sebagai program prioritas nasional dalam menghadapi meningkatnya intoleransi, radikalisme, dan polarisasi sosial berbasis agama (Indonesia, 2019). Melalui berbagai kebijakan, seminar, pendidikan, media sosial, dan penguatan birokrasi keagamaan, negara secara aktif membangun narasi keberagamaan yang toleran, inklusif, dan anti-ekstremisme. Moderasi beragama kemudian diposisikan sebagai paradigma keberagamaan ideal yang dianggap mampu menjaga harmoni sosial di tengah masyarakat Indonesia yang plural dan multikultural (Lubis, 2021).

Secara konseptual, moderasi beragama dipahami sebagai cara pandang dan praktik keberagamaan yang mengedepankan keseimbangan, toleransi, dan penolakan terhadap sikap ekstrem dalam beragama (Shihab, 2020). Konsep ini sering dikaitkan dengan istilah *wasathiyyah* dalam tradisi Islam yang menekankan prinsip jalan tengah serta keseimbangan dalam memahami agama (Shihab, 2020). Dalam konteks Indonesia, moderasi beragama tidak hanya dipahami sebagai nilai teologis, tetapi juga menjadi bagian dari strategi kebangsaan dalam menjaga integrasi nasional. Negara melihat bahwa keberagaman etnis, budaya, dan agama di Indonesia membutuhkan pola keberagamaan yang mampu menghindari konflik identitas dan menjaga stabilitas politik nasional (Azra, 2021).

Kemunculan moderasi beragama sebagai proyek nasional tidak dapat dilepaskan dari meningkatnya kekhawatiran negara terhadap fenomena radikalisme dan intoleransi keagamaan di era digital. Perkembangan media sosial telah membuka ruang yang luas bagi penyebaran ideologi keagamaan transnasional, politik identitas, dan propaganda ekstremisme berbasis agama (Kursuncu, 2020). Kondisi tersebut mendorong negara untuk memperkuat kontrol terhadap ruang publik keagamaan melalui produksi narasi moderasi dan anti-radikalisme. Dalam situasi ini, moderasi beragama tidak lagi sekadar menjadi konsep etis-keagamaan, tetapi juga berkembang sebagai instrumen sosial-politik yang digunakan negara dalam mengelola kehidupan keberagamaan masyarakat.

Di satu sisi, moderasi beragama dipandang sebagai solusi penting dalam mencegah konflik sosial dan memperkuat toleransi antarumat beragama (Abdullah, 2020). Berbagai

penelitian menunjukkan bahwa penguatan moderasi beragama memiliki kontribusi signifikan dalam membangun harmoni sosial dan memperkuat nilai-nilai kebangsaan di tengah meningkatnya polarisasi identitas keagamaan (Maarif, 2015). Namun di sisi lain, muncul sejumlah kritik yang melihat bahwa moderasi beragama juga berpotensi menjadi instrumen ideologis negara dalam membentuk pola keberagamaan masyarakat sesuai dengan kepentingan kekuasaan (Burhani, 2020). Negara tidak hanya bertindak sebagai regulator yang menjaga stabilitas sosial, tetapi juga sebagai produsen wacana yang menentukan model keberagamaan yang dianggap sah, moderat, dan sesuai dengan ideologi nasional.

Dalam konteks tersebut, teori hegemoni Antonio Gramsci menjadi relevan digunakan sebagai pisau analisis dalam membaca relasi agama dan negara di Indonesia. Antonio Gramsci menjelaskan bahwa dominasi modern tidak hanya berlangsung melalui kekuatan represif negara, tetapi juga melalui pembentukan persetujuan sosial (*consent*) yang dibangun melalui institusi budaya, pendidikan, media, dan organisasi sosial (Gramsci, 1971). Menurut Gramsci, kelompok dominan mempertahankan kekuasaannya dengan membangun legitimasi moral dan intelektual sehingga masyarakat menerima ideologi dominan sebagai sesuatu yang wajar dan benar (Simon, 2004). Dengan demikian, kekuasaan tidak lagi semata-mata bergantung pada kekerasan, tetapi bekerja secara halus melalui produksi kesadaran sosial masyarakat.

Dalam perspektif Gramsci, negara modern bekerja melalui dua instrumen utama, yaitu *political society* dan *civil society* (Patria & Arief, 2015). *Political society* berkaitan dengan perangkat koersif seperti hukum, militer, dan aparat keamanan, sedangkan *civil society* bekerja melalui institusi budaya dan sosial seperti sekolah, media massa, organisasi keagamaan, dan kelompok intelektual. Melalui *civil society*, negara dapat membangun konsensus sosial tanpa harus menggunakan kekerasan secara langsung (Asyhari, 2021). Dalam konteks moderasi beragama, negara memanfaatkan berbagai institusi sosial untuk mereproduksi narasi keberagamaan moderat sebagai bentuk kesadaran kolektif masyarakat Indonesia.

Praktik hegemonik tersebut terlihat dari keterlibatan aktif negara dalam memproduksi dan menyebarkan wacana moderasi beragama melalui kurikulum pendidikan, pelatihan aparatur, media sosial, hingga lembaga keagamaan (Indonesia, 2019). Narasi toleransi, anti-ekstremisme, dan nasionalisme religius direproduksi secara terus-menerus sehingga diterima masyarakat sebagai kebutuhan bersama demi menjaga stabilitas nasional. Dalam kondisi tersebut, moderasi beragama dapat dipahami sebagai bentuk hegemoni budaya yang bekerja melalui legitimasi moral dan intelektual, bukan semata-mata melalui dominasi koersif negara.

Selain itu, praktik moderasi beragama juga menunjukkan adanya proses kategorisasi sosial terhadap kelompok-kelompok tertentu yang dianggap tidak sesuai dengan konstruksi keberagamaan moderat (Widianto, 2024). Kelompok yang berada di luar narasi moderasi sering kali diposisikan sebagai radikal, intoleran, atau ancaman terhadap persatuan nasional. Dalam perspektif Gramsci, kondisi tersebut menunjukkan bagaimana negara memiliki

otoritas dalam menentukan batas-batas wacana keagamaan yang dapat diterima di ruang publik. Dengan demikian, moderasi beragama tidak sepenuhnya netral, tetapi berkaitan erat dengan relasi kuasa dan kepentingan ideologis negara.

Penelitian tentang moderasi beragama selama ini umumnya lebih banyak berfokus pada aspek pendidikan, toleransi, dan resolusi konflik sosial (Azra, 2021). Sementara itu, penelitian yang menempatkan moderasi beragama sebagai bagian dari praktik hegemoni negara masih relatif terbatas, khususnya dalam perspektif teori kritis Antonio Gramsci. Beberapa penelitian sebelumnya lebih banyak menyoroti moderasi beragama sebagai solusi normatif dalam menjaga kerukunan sosial tanpa melihat bagaimana negara memproduksi dan mengontrol wacana tersebut melalui institusi sosial dan budaya (Hidayat, 2021). Oleh karena itu, artikel ini berupaya mengisi kekosongan kajian tersebut dengan menganalisis moderasi beragama sebagai instrumen hegemoni negara dalam perspektif teori hegemoni Antonio Gramsci.

Melalui pendekatan tersebut, penelitian ini tidak dimaksudkan untuk menolak nilai-nilai toleransi dan perdamaian yang terkandung dalam moderasi beragama. Sebaliknya, penelitian ini bertujuan untuk membaca secara kritis bagaimana relasi kuasa bekerja di balik produksi wacana moderasi beragama di Indonesia. Dengan menggunakan perspektif Gramsci, artikel ini berupaya menunjukkan bahwa moderasi beragama bukan hanya proyek sosial-keagamaan, tetapi juga bagian dari mekanisme ideologis negara dalam membangun legitimasi dan mempertahankan stabilitas sosial-politik nasional.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan library research atau studi kepustakaan. Pendekatan ini dipilih karena penelitian berfokus pada analisis konsep, teori, dan relasi kekuasaan yang terkandung dalam wacana moderasi beragama di Indonesia melalui perspektif hegemoni Antonio Gramsci (Creswell & Creswell, 2018). Penelitian kepustakaan memungkinkan peneliti melakukan eksplorasi secara mendalam terhadap berbagai sumber literatur yang berkaitan dengan moderasi beragama, relasi agama dan negara, serta teori hegemoni dalam tradisi pemikiran kritis. Dalam penelitian kualitatif, realitas sosial dipahami sebagai sesuatu yang kompleks dan tidak dapat dijelaskan hanya melalui pendekatan statistik, melainkan membutuhkan interpretasi mendalam terhadap makna, wacana, dan praktik sosial yang berkembang di masyarakat (Moleong, 2017).

Pendekatan kualitatif digunakan karena penelitian ini tidak bertujuan mengukur fenomena secara kuantitatif, melainkan memahami bagaimana negara memproduksi dan mereproduksi narasi moderasi beragama sebagai bentuk legitimasi ideologis dalam kehidupan sosial-keagamaan masyarakat Indonesia. Penelitian ini menempatkan moderasi beragama bukan hanya sebagai konsep normatif, tetapi juga sebagai praktik sosial-politik yang berkaitan dengan relasi kuasa dan produksi kesadaran kolektif (Denzin & Lincoln, 2018). Dengan demikian, pendekatan interpretatif menjadi penting untuk membaca bagaimana negara

membangun konsensus sosial melalui institusi budaya, pendidikan, media, dan birokrasi keagamaan.

Sumber data dalam penelitian ini terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dari karya-karya utama Antonio Gramsci, khususnya *Selections from the Prison Notebooks*, yang memuat konsep hegemoni, *civil society*, dan *intellectual leadership* sebagai kerangka teoritis utama penelitian (Gramsci, 1971). Selain itu, data primer juga diperoleh dari dokumen resmi pemerintah terkait moderasi beragama yang diterbitkan oleh Kementerian Agama Republik Indonesia, terutama buku *Moderasi Beragama* yang menjadi dasar konseptual kebijakan moderasi di Indonesia (Indonesia, 2019).

Adapun data sekunder diperoleh dari berbagai jurnal ilmiah nasional dan internasional, artikel akademik, hasil penelitian terdahulu, buku, dan publikasi ilmiah lain yang relevan dengan tema penelitian (Sugiyono, 2020). Peneliti menggunakan berbagai referensi dari jurnal bereputasi nasional seperti *Studia Islamika*, *Jurnal Harmoni*, *Al-Jami'ah*, dan *Journal of Indonesian Islam* untuk memperkuat analisis teoritis dan kontekstual mengenai moderasi beragama serta relasi agama dan negara di Indonesia. Penggunaan sumber jurnal ilmiah menjadi penting untuk memperoleh perspektif akademik yang lebih komprehensif dan aktual mengenai perkembangan diskursus moderasi beragama dalam konteks sosial-politik Indonesia kontemporer.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui dokumentasi terhadap berbagai sumber literatur yang relevan dengan fokus penelitian (Arikunto, 2019). Dokumentasi dilakukan dengan mengidentifikasi, mengklasifikasi, dan menelaah berbagai referensi yang berkaitan dengan teori hegemoni Gramsci, moderasi beragama, serta praktik kekuasaan negara dalam ruang sosial-keagamaan. Data yang telah dikumpulkan kemudian diseleksi berdasarkan relevansi tema, kredibilitas sumber, dan kontribusinya terhadap pengembangan analisis penelitian.

Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan metode *content analysis* atau analisis isi. Analisis isi digunakan untuk memahami makna, ideologi, dan relasi kuasa yang terkandung dalam berbagai teks dan dokumen mengenai moderasi beragama (Krippendorff, 2019). Dalam proses analisis, peneliti membaca secara kritis bagaimana negara membangun narasi moderasi beragama melalui berbagai institusi sosial dan bagaimana narasi tersebut diproduksi sebagai bentuk legitimasi ideologis. Pendekatan Gramsci digunakan untuk menafsirkan proses hegemonisasi yang berlangsung melalui mekanisme persetujuan sosial (*consent*) daripada dominasi koersif semata.

Selain itu, penelitian ini juga menggunakan pendekatan deskriptif-analitis. Pendekatan deskriptif digunakan untuk menggambarkan perkembangan moderasi beragama sebagai kebijakan negara di Indonesia, sedangkan pendekatan analitis digunakan untuk menghubungkan fenomena tersebut dengan teori hegemoni Antonio Gramsci (Bungin, 2017). Melalui pendekatan tersebut, penelitian ini berupaya menjelaskan bahwa moderasi beragama

tidak hanya merupakan proyek sosial-keagamaan, tetapi juga menjadi bagian dari strategi negara dalam membangun stabilitas sosial dan legitimasi politik melalui produksi kesadaran kolektif masyarakat.

Dengan menggunakan pendekatan kualitatif berbasis studi kepustakaan, penelitian ini diharapkan mampu memberikan pembacaan kritis terhadap relasi agama dan negara dalam konteks moderasi beragama di Indonesia. Penelitian ini juga diharapkan dapat memperluas kajian tentang moderasi beragama dari perspektif teori kritis, khususnya teori hegemoni Antonio Gramsci, yang selama ini masih relatif terbatas dalam kajian Aqidah dan Filsafat Islam.

Hasil dan Pembahasan

Konsep Hegemoni dalam Pemikiran Antonio Gramsci

Antonio Gramsci merupakan salah satu tokoh penting dalam tradisi pemikiran neo-Marxis yang memberikan perhatian besar terhadap persoalan budaya, ideologi, dan relasi kekuasaan dalam masyarakat modern. Berbeda dengan Karl Marx yang lebih menitikberatkan dominasi pada aspek ekonomi dan struktur material, Gramsci melihat bahwa kekuasaan modern tidak hanya bekerja melalui kontrol ekonomi dan kekuatan represif negara, tetapi juga melalui penguasaan kesadaran sosial masyarakat (Simon, 2004). Dalam pandangan Gramsci, kelompok penguasa dapat mempertahankan dominasinya bukan semata-mata karena memiliki kekuatan politik dan militer, melainkan karena berhasil membangun legitimasi moral dan intelektual yang diterima masyarakat sebagai sesuatu yang wajar dan benar.

Konsep utama yang ditawarkan Gramsci dalam membaca relasi kekuasaan tersebut adalah konsep hegemoni. Secara sederhana, hegemoni dapat dipahami sebagai bentuk dominasi ideologis yang berlangsung melalui persetujuan sosial (consent) masyarakat terhadap nilai, norma, dan cara pandang yang dibangun oleh kelompok dominan (Gramsci, 1971). Dalam sistem hegemonik, masyarakat tidak merasa sedang didominasi karena ideologi penguasa telah diterima sebagai kesadaran kolektif bersama. Dengan demikian, kekuasaan bekerja secara halus melalui proses internalisasi nilai dan pembentukan pola pikir masyarakat.

Gramsci menjelaskan bahwa dominasi dalam masyarakat modern tidak lagi efektif apabila hanya mengandalkan kekerasan dan represi politik semata (Patria & Arief, 2015). Negara modern membutuhkan legitimasi sosial agar kekuasaan dapat bertahan dalam jangka panjang. Oleh sebab itu, kelompok dominan harus mampu membangun kepemimpinan moral dan intelektual (moral and intellectual leadership) sehingga masyarakat secara sukarela menerima ideologi yang diproduksi oleh negara atau kelompok penguasa (Simon, 2004). Dalam konteks tersebut, hegemoni menjadi bentuk kekuasaan yang bekerja melalui pengaruh budaya dan produksi kesadaran sosial.

Dalam teori Gramsci, negara tidak hanya dipahami sebagai institusi politik formal yang memiliki perangkat hukum dan kekuatan koersif, tetapi juga mencakup wilayah budaya

dan sosial yang disebut sebagai civil society (Gramsci, 1971). Civil society meliputi sekolah, media massa, organisasi keagamaan, keluarga, lembaga pendidikan, dan kelompok intelektual yang berfungsi membentuk pola pikir masyarakat. Melalui institusi-institusi tersebut, negara dapat mereproduksi nilai dan ideologi dominan tanpa harus menggunakan kekerasan secara langsung.

Gramsci membagi struktur kekuasaan ke dalam dua wilayah utama, yaitu political society dan civil society (Patria & Arief, 2015). Political society berkaitan dengan perangkat koersif negara seperti militer, kepolisian, hukum, dan birokrasi pemerintahan yang berfungsi menjaga stabilitas melalui kekuatan formal. Sementara itu, civil society bekerja melalui pendekatan persuasif dan ideologis dengan membangun konsensus sosial di tengah masyarakat. Menurut Gramsci, kekuasaan modern lebih efektif bekerja melalui civil society karena masyarakat cenderung menerima dominasi yang dibangun melalui budaya dan pendidikan dibandingkan dominasi yang dilakukan secara represif.

Selain itu, Gramsci juga menekankan pentingnya peran kaum intelektual dalam mempertahankan hegemoni (Gramsci, 1971). Menurutnya, setiap kelompok sosial membutuhkan intelektual organik (organic intellectuals) yang bertugas menyebarkan ideologi dan membangun legitimasi sosial terhadap kepentingan kelompok tersebut. Dalam konteks negara modern, intelektual dapat berupa akademisi, tokoh agama, media, birokrat, maupun elit budaya yang memiliki pengaruh dalam membentuk opini publik. Mereka berfungsi sebagai perantara antara negara dan masyarakat dalam proses produksi kesadaran sosial.

Dalam konteks kehidupan sosial-keagamaan, teori hegemoni Gramsci menjadi sangat relevan untuk membaca bagaimana negara membangun legitimasi terhadap model keberagamaan tertentu (Burhani, 2021). Negara tidak hanya mengontrol masyarakat melalui hukum dan regulasi formal, tetapi juga melalui produksi wacana keagamaan yang disebarkan melalui institusi pendidikan, media, dan organisasi keagamaan. Dengan demikian, praktik keberagamaan masyarakat secara perlahan diarahkan menuju bentuk keberagamaan yang dianggap sesuai dengan kepentingan negara dan stabilitas nasional.

Perspektif Gramsci juga menunjukkan bahwa ideologi dominan sering kali bekerja secara tersembunyi melalui bahasa, simbol, dan narasi budaya (Hall, 1986). Dalam konteks moderasi beragama di Indonesia, negara membangun narasi toleransi, anti-radikalisme, dan nasionalisme religius sebagai bentuk legitimasi moral terhadap kebijakan moderasi beragama. Narasi tersebut direproduksi secara terus-menerus melalui media sosial, pendidikan, seminar, dan birokrasi keagamaan sehingga diterima masyarakat sebagai sesuatu yang normal dan ideal.

Lebih jauh, teori hegemoni Gramsci menjelaskan bahwa dominasi ideologis dapat menciptakan kategorisasi sosial terhadap kelompok-kelompok tertentu (Laclau & Mouffe, 2001). Kelompok yang berada di luar ideologi dominan sering kali diposisikan sebagai ancaman, radikal, atau tidak sesuai dengan kepentingan nasional. Dalam kondisi tersebut,

negara memiliki otoritas untuk menentukan batas-batas identitas sosial dan keberagamaan yang dapat diterima di ruang publik. Dengan demikian, hegemoni tidak hanya berkaitan dengan kekuasaan politik, tetapi juga berkaitan dengan kontrol terhadap produksi makna dan identitas sosial masyarakat.

Melalui kerangka teori tersebut, konsep moderasi beragama di Indonesia dapat dibaca sebagai bagian dari praktik hegemonik negara dalam membangun konsensus sosial mengenai model keberagamaan yang ideal. Negara memanfaatkan berbagai institusi budaya dan sosial untuk membentuk pola pikir masyarakat sehingga moderasi beragama diterima sebagai kebutuhan bersama demi menjaga stabilitas sosial dan integrasi nasional. Dalam perspektif Gramsci, praktik tersebut menunjukkan bagaimana kekuasaan modern bekerja melalui produksi kesadaran sosial dan legitimasi budaya, bukan semata-mata melalui dominasi koersif.

Moderasi Beragama sebagai Praktik Hegemoni Negara di Indonesia

Moderasi beragama dalam beberapa tahun terakhir berkembang menjadi salah satu kebijakan strategis negara dalam menjaga stabilitas sosial dan politik di Indonesia. Pemerintah melalui Kementerian Agama Republik Indonesia menjadikan moderasi beragama sebagai paradigma utama dalam pembangunan kehidupan keagamaan nasional (Indonesia, 2019). Program tersebut tidak hanya diwujudkan dalam bentuk regulasi formal, tetapi juga disebarkan secara massif melalui pendidikan, media sosial, pelatihan aparatur negara, lembaga keagamaan, dan berbagai forum akademik. Dalam konteks ini, moderasi beragama tidak lagi sekadar menjadi konsep normatif tentang toleransi, melainkan berkembang menjadi wacana dominan yang diproduksi secara sistematis oleh negara.

Dalam perspektif Antonio Gramsci, kondisi tersebut dapat dibaca sebagai bentuk praktik hegemoni negara melalui produksi kesadaran sosial masyarakat (Gramsci, 1971). Gramsci menjelaskan bahwa kelompok dominan mempertahankan kekuasaan tidak hanya melalui kekuatan koersif, tetapi juga melalui kemampuan membangun konsensus sosial sehingga masyarakat menerima ideologi dominan sebagai sesuatu yang wajar dan benar (Simon, 2004). Melalui mekanisme tersebut, negara tidak perlu menggunakan kekerasan secara langsung karena masyarakat secara sukarela menerima narasi yang diproduksi oleh penguasa.

Praktik hegemonik dalam moderasi beragama terlihat dari bagaimana negara membangun legitimasi moral terhadap konsep keberagamaan moderat. Moderasi beragama diposisikan sebagai bentuk keberagamaan ideal yang dianggap mampu menjaga harmoni sosial, mencegah radikalisme, dan memperkuat integrasi nasional (Abdullah, 2020). Narasi tersebut terus direproduksi melalui berbagai institusi sosial seperti sekolah, universitas, media massa, organisasi keagamaan, hingga ruang digital. Dalam perspektif Gramsci, institusi-institusi tersebut merupakan bagian dari civil society yang memiliki fungsi penting dalam membangun persetujuan sosial (consent) masyarakat terhadap ideologi dominan negara (Patria & Arief, 2015).

Di bidang pendidikan, moderasi beragama diintegrasikan ke dalam kurikulum pembelajaran, seminar akademik, pelatihan guru, hingga kegiatan organisasi mahasiswa (Indonesia, 2019). Negara berupaya membangun kesadaran generasi muda bahwa keberagamaan moderat merupakan bentuk identitas keislaman yang sesuai dengan nilai kebangsaan Indonesia. Melalui proses pendidikan tersebut, moderasi beragama tidak hanya diajarkan sebagai konsep moral, tetapi juga direproduksi sebagai norma sosial yang dianggap benar dan ideal dalam kehidupan masyarakat plural.

Selain pendidikan, media massa dan media sosial juga memiliki peran penting dalam memperkuat hegemoni moderasi beragama (Azra, 2021). Negara dan berbagai lembaga keagamaan aktif memproduksi konten-konten digital yang mempromosikan toleransi, anti-ekstremisme, dan nasionalisme religius. Narasi tersebut disebarkan secara terus-menerus melalui platform digital sehingga membentuk opini publik mengenai pentingnya moderasi beragama dalam menjaga stabilitas nasional. Dalam perspektif Gramsci, media merupakan instrumen budaya yang sangat efektif dalam membentuk kesadaran kolektif masyarakat modern (Hall, 1986).

Praktik hegemonik negara juga terlihat melalui keterlibatan tokoh agama dan intelektual dalam mendukung narasi moderasi beragama. Gramsci menyebut kelompok ini sebagai *organic intellectuals*, yaitu kelompok intelektual yang berfungsi menyebarkan ideologi dominan kepada masyarakat (Gramsci, 1971). Dalam konteks Indonesia, tokoh agama, akademisi, dan birokrat keagamaan berperan sebagai perantara antara negara dan masyarakat dalam mereproduksi wacana moderasi beragama. Mereka memberikan legitimasi moral dan teologis terhadap kebijakan moderasi sehingga masyarakat menerima narasi tersebut sebagai kebutuhan bersama.

Selain membangun legitimasi sosial, moderasi beragama juga menunjukkan adanya proses kategorisasi terhadap kelompok-kelompok tertentu yang dianggap berada di luar narasi moderasi (Burhani, 2020). Kelompok yang dianggap tidak sesuai dengan konstruksi keberagamaan moderat sering kali diposisikan sebagai radikal, intoleran, atau ancaman terhadap persatuan nasional. Dalam perspektif Gramsci, proses tersebut merupakan bagian dari praktik hegemoni karena negara memiliki otoritas dalam menentukan batas-batas identitas sosial dan keberagamaan yang dapat diterima di ruang publik.

Fenomena tersebut menunjukkan bahwa moderasi beragama tidak sepenuhnya netral secara politik. Negara memiliki kepentingan dalam membangun stabilitas sosial dan mempertahankan legitimasi kekuasaan melalui pengelolaan wacana keagamaan (Burhani, 2021). Dalam konteks ini, moderasi beragama berfungsi sebagai instrumen ideologis yang membantu negara mengontrol ruang publik keagamaan tanpa harus menggunakan pendekatan represif secara langsung. Dominasi berlangsung melalui produksi narasi dan pembentukan kesadaran sosial masyarakat mengenai bentuk keberagamaan yang dianggap sah dan ideal.

Meskipun demikian, penting dipahami bahwa kritik terhadap moderasi beragama bukan berarti menolak nilai-nilai toleransi dan perdamaian (Hidayat, 2021). Moderasi beragama tetap memiliki kontribusi positif dalam menjaga harmoni sosial dan mengurangi potensi konflik keagamaan di Indonesia. Namun, pendekatan kritis diperlukan agar moderasi beragama tidak dipahami secara normatif semata, melainkan juga dianalisis sebagai bagian dari relasi kuasa dan praktik ideologis negara dalam masyarakat modern.

Dalam perspektif teori hegemoni Gramsci, praktik moderasi beragama di Indonesia menunjukkan bagaimana negara modern bekerja melalui pendekatan budaya dan ideologis untuk mempertahankan stabilitas sosial-politik (Patria & Arief, 2015). Negara memanfaatkan institusi pendidikan, media, dan otoritas keagamaan untuk membangun persetujuan sosial terhadap narasi keberagamaan tertentu. Dengan demikian, moderasi beragama tidak hanya menjadi proyek sosial-keagamaan, tetapi juga menjadi mekanisme hegemonik dalam membentuk pola pikir dan identitas keberagamaan masyarakat Indonesia.

Dampak Sosial dan Politik Moderasi Beragama dalam Kehidupan Masyarakat

Moderasi beragama sebagai kebijakan nasional memiliki dampak yang cukup signifikan terhadap kehidupan sosial dan politik masyarakat Indonesia. Dalam konteks sosial, moderasi beragama dipandang mampu memperkuat toleransi antarumat beragama dan menjaga harmoni masyarakat di tengah pluralitas identitas yang sangat kompleks (Azra, 2021). Indonesia sebagai negara multikultural memiliki potensi konflik berbasis agama yang cukup tinggi apabila tidak diimbangi dengan pola keberagamaan yang inklusif dan toleran. Oleh sebab itu, negara memandang moderasi beragama sebagai instrumen penting dalam menjaga integrasi nasional serta mencegah lahirnya gerakan ekstremisme dan intoleransi keagamaan.

Dalam praktiknya, moderasi beragama telah mendorong lahirnya berbagai program sosial yang berorientasi pada penguatan nilai toleransi dan dialog antaragama (Abdullah, 2020). Berbagai institusi pendidikan, organisasi masyarakat, dan lembaga keagamaan mulai mengembangkan program-program yang menekankan pentingnya penghormatan terhadap perbedaan keyakinan dan identitas budaya. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa moderasi beragama memiliki kontribusi positif dalam membangun kesadaran masyarakat mengenai pentingnya kehidupan sosial yang damai dan harmonis.

Selain berdampak pada kehidupan sosial, moderasi beragama juga memiliki implikasi politik yang cukup kuat dalam relasi antara negara dan masyarakat (Burhani, 2021). Negara menggunakan moderasi beragama sebagai bagian dari strategi politik dalam menjaga stabilitas nasional dan mengontrol potensi konflik identitas yang dapat mengganggu legitimasi kekuasaan. Dalam konteks ini, moderasi beragama tidak hanya menjadi proyek moral dan keagamaan, tetapi juga menjadi bagian dari strategi negara dalam mempertahankan keteraturan sosial-politik.

Dalam perspektif Antonio Gramsci, praktik tersebut menunjukkan bagaimana negara membangun hegemoni melalui produksi konsensus sosial (Gramsci, 1971). Negara tidak lagi bergantung sepenuhnya pada kekuatan represif untuk menjaga stabilitas, melainkan membangun legitimasi melalui narasi toleransi, nasionalisme, dan anti-radikalisme. Melalui proses tersebut, masyarakat menerima moderasi beragama sebagai kebutuhan bersama demi menjaga keamanan dan persatuan nasional. Dominasi negara berlangsung secara halus melalui pembentukan kesadaran sosial yang diproduksi melalui pendidikan, media, dan institusi budaya lainnya.

Dampak politik moderasi beragama juga terlihat dari munculnya kategorisasi sosial terhadap kelompok-kelompok keagamaan tertentu (Burhani, 2020). Kelompok yang dianggap berada di luar konstruksi moderasi sering kali diposisikan sebagai ancaman terhadap stabilitas nasional, radikal, intoleran, atau anti-Pancasila. Dalam kondisi demikian, negara memiliki legitimasi moral untuk melakukan kontrol terhadap kelompok-kelompok tersebut melalui regulasi, pengawasan digital, maupun pembatasan ruang gerak sosial-politik mereka. Perspektif ini menunjukkan bahwa moderasi beragama dapat berfungsi sebagai instrumen legitimasi politik negara dalam menentukan batas-batas keberagamaan yang dapat diterima di ruang publik.

Selain itu, moderasi beragama juga berdampak terhadap perubahan otoritas keagamaan di masyarakat (Patria & Arief, 2015). Negara semakin memiliki posisi dominan dalam menentukan narasi keagamaan yang dianggap benar dan moderat. Tokoh agama, akademisi, dan lembaga pendidikan yang mendukung narasi moderasi memperoleh ruang legitimasi yang lebih besar di ruang publik. Sebaliknya, kelompok yang memiliki pandangan berbeda sering kali mengalami marginalisasi sosial dan politik. Dalam perspektif Gramsci, kondisi tersebut menunjukkan bagaimana negara memanfaatkan kelompok intelektual dan institusi budaya untuk mempertahankan hegemoni ideologisnya.

Namun demikian, moderasi beragama juga menghadapi sejumlah tantangan dalam implementasinya. Salah satu tantangan utama adalah munculnya anggapan bahwa moderasi beragama merupakan proyek politik negara yang dapat membatasi kebebasan ekspresi keagamaan masyarakat (Hidayat, 2021). Sebagian kelompok memandang bahwa narasi moderasi sering kali digunakan untuk mendeligitimasi kelompok tertentu yang kritis terhadap kebijakan negara. Akibatnya, moderasi beragama terkadang dipersepsikan sebagai instrumen kontrol sosial yang berpotensi mengurangi keberagaman tafsir dalam kehidupan keagamaan masyarakat Indonesia.

Selain itu, tantangan lain muncul dari perkembangan media digital yang memungkinkan penyebaran berbagai ideologi keagamaan secara bebas dan cepat (Qodir, 2021). Negara menghadapi kesulitan dalam mengontrol ruang digital yang dipenuhi berbagai narasi keagamaan, politik identitas, dan gerakan transnasional berbasis agama. Dalam situasi tersebut, moderasi beragama menjadi semakin penting bagi negara sebagai instrumen untuk membangun narasi tandingan terhadap ekstremisme dan intoleransi di ruang publik digital.

Meskipun memiliki berbagai tantangan dan kritik, moderasi beragama tetap memiliki relevansi penting dalam kehidupan masyarakat Indonesia yang plural (Maarif, 2015). Nilai-nilai toleransi, keseimbangan, dan penghormatan terhadap perbedaan tetap menjadi fondasi utama dalam menjaga stabilitas sosial di tengah keberagaman budaya dan agama. Namun, pendekatan kritis terhadap moderasi beragama tetap diperlukan agar konsep tersebut tidak berkembang menjadi instrumen hegemonik yang digunakan negara untuk membatasi kebebasan berpikir dan keberagaman ekspresi keagamaan masyarakat.

Dengan demikian, moderasi beragama memiliki dua dimensi yang saling berkaitan, yaitu dimensi sosial-keagamaan dan dimensi politik-ideologis (Simon, 2004). Di satu sisi, moderasi beragama berfungsi memperkuat toleransi dan harmoni sosial. Namun di sisi lain, moderasi beragama juga dapat menjadi instrumen hegemoni negara dalam membangun legitimasi politik dan mengontrol ruang publik keagamaan. Perspektif Antonio Gramsci membantu menjelaskan bahwa relasi agama dan negara dalam konteks moderasi beragama tidak dapat dilepaskan dari praktik produksi wacana, kekuasaan, dan pembentukan kesadaran sosial masyarakat.

Kesimpulan

Artikel ini menyimpulkan bahwa moderasi beragama di Indonesia tidak sekadar berfungsi sebagai konsep normatif penjaga toleransi, melainkan beroperasi sebagai instrumen hegemoni negara. Melalui perspektif Antonio Gramsci, negara membangun persetujuan sosial (*consent*) melalui berbagai institusi seperti pendidikan, media, dan birokrasi untuk mengonstruksi keberagaman moderat sebagai kesadaran kolektif. Praktik ini memiliki implikasi ganda: di satu sisi memperkuat integrasi nasional, namun di sisi lain berpotensi menjadi alat kontrol sosial dan marginalisasi terhadap kelompok yang dianggap menyimpang dari standar negara. Oleh karena itu, pendekatan kritis terhadap moderasi beragama sangat diperlukan untuk memastikan konsep ini tetap menjadi sarana merawat perdamaian, bukan bermetamorfosis menjadi instrumen dominasi ideologis yang membatasi ruang kebebasan dan keberagaman ekspresi keagamaan.

Daftar Pustaka

- Abdullah, M. A. (2020). Relasi Agama dan Negara dalam Perspektif Moderasi. *Al-Jami'ah*, 58(2).
- Arikunto, S. (2019). *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*. Rineka Cipta.
- Azra, A. (2021). Religious Harmony and Moderation in Indonesia. *Studia Islamika*, 28(3).
- Bungin, B. (2017). *Penelitian Kualitatif*. Kencana.
- Burhani, A. N. (2020). Pluralism, Liberalism and Islamism. *Journal of Indonesian Islam*, 14(2).
- Burhani, A. N. (2021). State and Religious Control in Indonesia. *Journal of Indonesian Islam*, 15(1).

- Creswell, J. W., & Creswell, J. D. (2018). *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches*. Sage Publications.
- Denzin, N. K., & Lincoln, Y. S. (2018). *The Sage Handbook of Qualitative Research*. Sage Publications.
- Gramsci, A. (1971). *Selections from the Prison Notebooks*. International Publishers.
- Hall, S. (1986). The Problem of Ideology: Marxism without Guarantees. *Journal of Communication Inquiry*, 10(2).
- Hidayat, K. (2021). Moderasi Beragama dan Kebangsaan Indonesia. *Jurnal Harmoni*, 20(2).
- Indonesia, K. A. R. (2019). *Moderasi Beragama*. Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI.
- Krippendorff, K. (2019). *Content Analysis: An Introduction to Its Methodology*. Sage Publications.
- Kursuncu, U. (2020). *Modeling Islamist Extremist Communications on Social Media*.
- Laclau, E., & Mouffe, C. (2001). *Hegemony and Socialist Strategy*. Verso.
- Lubis, M. R. (2021). Moderasi Beragama dalam Perspektif Kebijakan Publik. *Jurnal Harmoni*, 20(2).
- Maarif, A. S. (2015). *Islam dalam Bingkai Keindonesiaan dan Kemanusiaan*. Mizan.
- Moleong, L. J. (2017). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Remaja Rosdakarya.
- Patria, N., & Arief, A. (2015). *Antonio Gramsci: Negara dan Hegemoni*. Pustaka Pelajar.
- Qodir, Z. (2021). Radikalisme Agama di Indonesia. *Jurnal Maarif*, 15(1).
- Shihab, M. Q. (2020). *Wasathiyah: Wawasan Islam tentang Moderasi Beragama*. Lentera Hati.
- Simon, R. (2004). *Gagasan-Gagasan Politik Gramsci*. Pustaka Pelajar.
- Sri Irmayanti Asyhari, D. K. K. (2021). Gagasan dalam Kolaborasi:(Pemikiran dan Wawasan Para Cendekia). Belibis Pustaka.
- Sugiyono. (2020). *Metode Penelitian Kualitatif*. Alfabeta.
- Widianto, A. A. (2024). Hegemoni 'Agama Resmi' dan Ambiguitas Kebebasan Berkeyakinan. *Jurnal Smart*, 10(1).